

**Tabel 2. Laporan Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah
Tahun 2024 (dalam Triliun Rupiah)
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah :
Kabupaten Way Kanan
Bulan : Oktober 2024**

No.	Deskripsi	Kabupaten Way Kanan
(1)	(2)	(3)
A	Profil Pengadaan Barang/Jasa	
1	Belanja Pengadaan	0.489597
2	Belanja Pengadaan yang diumumkan pada SiRUP	0.508478
	a. Belanja Barang/Jasa yang diumumkan pada SiRUP Penyedia (Penyedia Murni + Penyedia Dalam Swakelola)	0.316200
	b. Belanja Barang/Jasa yang diumumkan pada SiRUP Swakelola	0.192278
3	Pencadangan Usaha Kecil yang diumumkan di SiRUP (tagging)	0.256906
4	Penggunaan Produksi Dalam Negeri yang diumumkan berdasarkan tagging PDN di SiRUP	0.314147
5	Realisasi Transaksi melalui SPSE (Pagu Transaksi) (5 = 5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4 + 5.5)	0.221712
5.1	Transaksi Pengadaan Melalui Pemilihan Penyedia	0.221073
a	Realisasi Transaksi Usaha Kecil	0.146969
	a. e-Tender/Seleksi (tagging)	0.088108
	b. Tender Cepat (tagging)	0.000000
	c. Pengadaan Langsung (Transaksional dan Pencatatan) (tagging)	0.026341
	d. Penunjukan Langsung (Transaksional dan Pencatatan) (tagging)	0.000000
	e. e-Purchasing (Tagging)	0.032520
b	Realisasi Transaksi Non Kecil	0.074057
	a. e-Tender/Seleksi	0.050352
	b. Tender Cepat	0.000000
	c. Pengadaan Langsung (non tender:Transaksional dan Pencatatan)	0.000271
	d. Penunjukan Langsung (non tender:Transaksional dan Pencatatan)	0.000000
	e. e-Purchasing (Tagging)	0.023434
5.2	Realisasi Kontes	0.000000
5.3	Realisasi Sayembara	0.000000
5.4	Realisasi Pengadaan Khusus	0.000047
	a. Penanganan Keadaan Darurat (Pencatatan Non Tender dan data SPSE Terpusat)	0.000000
	b. Pengadaan Dikecualikan (Pencatatan Non Tender)	0.000047
5.5	Realisasi Swakelola (Pencatatan)	0.000639
6	Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) (6 = 6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)	0.218850
6.1	Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) melalui e-Purchasing	0.053731
6.2	Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) melalui e-Tendering (pengadaan barang)	0.138460
6.3	Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) melalui Non e-Tendering & e-Purchasing Transaksional dan Pencatatan (pengadaan barang)	0.026659
6.4	Transaksi Penggunaan Produksi Dalam Negeri (PDN) melalui Bela Pengadaan	0.000000

B	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Kabupaten Way Kanan	Nasional
	1	Alokasi PDN Dalam RUP	$\frac{\sum \text{Tagging PDN dalam RUP Penyedia}}{\sum \text{RUP Penyedia}} \times 100\%$	99.35%
2	Transaksi Belanja PDN	$\frac{\sum \text{Transaksi PDN Penyedia}}{\sum \text{Transaksi Penyedia}} \times 100\%$	98.99%	89.94%
C	Alokasi Belanja Barang/Jasa untuk Produk UMK		Kabupaten Way Kanan	Nasional
	1	Alokasi UMK dalam RUP	$\frac{\sum \text{Tagging UMK dalam RUP Penyedia}}{\sum \text{RUP Penyedia}} \times 100\%$	81.25%
2	Transaksi Belanja Produk UMK	$\frac{\sum \text{Transaksi UMK Penyedia}}{\sum \text{Transaksi Penyedia}} \times 100\%$	66.48%	39.64%

**) data dari Tabel 1*

**) terdapat perubahan perhitungan untuk poin B dan C per tanggal 09 Oktober 2023*

**) terdapat perubahan tabel per tanggal 19 Februari 2024*

Sumber Data :

1. SiRUP dan SPSE per tanggal 14 Oktober 2024 (diolah)
2. Data APBD TA.2024 memakai data APBD TA.2023 serta klarifikasi data dari Pemerintah Daerah
3. Data APBN berdasarkan Perpres Nomor 76/2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, Akun 52 dan Akun 53 serta klarifikasi data dari Kementerian/Lembaga

Keterangan:

1. Sumber Dana pada Belanja Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga: APBN, APBNP, BLU, PHLN, PNBP
2. Sumber Dana Belanja Barang/Jasa pada Pemda: APBD, APBDP, BLU, BLUD, PHLN
3. Data non e-tendering/e-seleksi/e-purchasing: pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang tercatat di SPSE (ada beberapa pengadaan langsung/penunjukan langsung yang belum diumumkan di SiRUP)
4. Pengadaan Khusus berdasarkan Perpres 16/18 BAB VIII tentang Pengadaan Khusus yaitu PBJ dalam rangka penanganan keadaan darurat (misalnya untuk COVID) dan PBJ Dikecualikan (misalnya PBJ yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat seperti pembayaran Listrik, Telepon, dll)